

KPU KOTA SAWAHLUNTO

(656223)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Laporan Keuangan

Untuk Periode Semester II Tahun 2017

JALAN KHATIB SULAIMAN NO. 54 SAWAHLUNTO

E-MAIL : kpusawahlunto@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto adalah salah satu entitas akuntansi dibawah di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sawahlunto, 31 Desember 2017

Sekretaris,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Bet Mukhardi, S.Sos
NIP 197211301997011001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iv
Indeks Catatan Atas Laporan Keuangan	v
Daftar Singkatan	vii
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
Ringkasan Laporan Keuangan.....	1
Laporan Realisasi Anggaran	3
Neraca	4
Laporan Operasional (LO).....	5
Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
CALK Pendahuluan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Dasar Hukum	7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.3. Basis Akuntansi.....	8
A.4. Dasar Pengukuran....	8
A.5. Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
B.1. Pendapatan.....	17
B.2. Belanja Negara	17
B.3 Belanja Pegawai	19
B.4 Belanja Barang	19
B.5 Belanja Modal Tanah	20
B.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20
B.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21
B.8 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	21
B.9 Belanja Bantuan Sosial	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	22
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan.....	22
C.3. Persediaan.....	22
C.4. Tanah	23
C.5. Peralatan dan Mesin	23
C.6. Gedung dan Bangunan	24
C.7. Jalan dan Irigasi.....	25
C.8. Aset Tetap Lainnya.....	25
C.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	26
C.10. Akumulasi Aset Tetap	26
C.11. Aset Tak Berwujud	27
C.12. Aset Lain-lain	27
C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	28
C.14 Uang Muka dari KPPN	28
C.15 Pendapatan yang ditangguhkan	28
C.16 Pendapatan Diterima Dimuka	28
C.17 Utang kepada Pihak Ketiga	29
C.18 Dana yang harus disediakan untuk Kewajiban jangka pendek	29

C.19 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	29
C.20 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	30
C.21 Ekuitas	30
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	31
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	31
D.2 Beban Pegawai	31
D.3 Beban Persediaan	31
D.4 Beban Jasa	32
D.5 Beban Pemeliharaan	32
D.6 Beban Perjalanan Dinas	33
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	33
D.8 Beban Bantuan Sosial	34
D.9 Kegiatan Non Operasional	34
D.10 Pos Luar Biasa	34
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	35
E.1 Ekuitas Awal	35
E.2 Surplus (Defisit) LO	35
E.3 Koreksi Nilai Persediaan	35
E.4 Koreksi Aset Tetap	35
E.5 Koreksi Atas Beban	35
E.6 Koreksi Atas Pendapatan	36
E.7 Ekuitas Akhir	36
F. Pengungkapan Penting Lainnya	36
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	36
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	36
F.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	36
F.4. Rekening Pemerintah	37
F.5. Penyusutan Aset.....	37
F.6. Pengungkapan Lain-lain	37
Lampiran	38
Lampiran A.1	38
Lampiran A.2	39
Laporan-laporan Pendukung	42
CALK BMN	
Laporan SAIBA Semester II Tahun 2017	
BAR SAIBA KPPN Semester II Tahun 2017	
Neraca SIMAK BMN Semester 2 Tahun 2017	
Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester 2 Tahun 2017	
Laporan Penyusutan BMN Barang Kuasa Pengguna Semester 2 Tahun 2017	
Laporan Persediaan Semester 2 Tahun 2017	
Berita Acara Rekonsiliasi BMN Semester 2 Tahun 2017	
Rekening Koran bulan Desember Tahun 2017	
SK Sekretaris KPU Kota Sawahlunto tentang Pengelola Anggaran Tahun 2017	

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran A1 : Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap	38
Lampiran A2 : Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Per 31 Desember 2017	39

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Hal
Catatan A. Penjelasan Hukum	7
Catatan A.1. Dasar Hukum	7
Catatan A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	7
Catatan A.3. Basiswa Akuntansi	8
Catatan A.4. Dasar Pengukuran	8
Catatan A.5. Kebijakan Akuntansi	9
Catatan B. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
Catatan B.1. Pendapatan	17
Catatan B.2. Belanja Negara	17
Catatan B.3. Belanja Pegawai	19
Catatan B.4. Belanja Barang	19
Catatan B.5. Belanja Modal Modal Tanah	20
Catatan B.6. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20
Catatan B.7. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21
Catatan B.8. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	21
Catatan B.9. Belanja Bantuan Sosial	21
Catatan C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	21
Catatan C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	22
Catatan C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	22
Catatan C.3. Persediaan	22
Catatan C.4. Tanah	23
Catatan C.5. Peralatan dan Mesin	23
Catatan C.6. Gedung dan Bangunan	24
Catatan C.7. Jalan dan Irigasi	25
Catatan C.8. Aset Tetap Lainnya	25
Catatan C.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	26
Catatan C.10. Akumulasi Aset Tetap	26
Catatan C.11. Aset Tak Berwujud	27
Catatan C.12. Aset Lain-lain	27
Catatan C.13. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	28
Catatan C.14. Uang Muka dari KPPN	28
Catatan C.15. Pendapatan yang ditangguhkan	28
Catatan C.16. Pendapatan Diterima Dimuka	28
Catatan C.17. Utang kepada Pihak Ketiga	29
Catatan C.18. Dana yang harus disediakan untuk Kewajiban jangka pendek	29
Catatan C.19. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	29
Catatan C.20. Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	30
Catatan C.21. Ekuitas	30
Catatan D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	31
Catatan D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	31

Catatan D.2	Beban Pegawai	31
Catatan D.3	Beban Persediaan	31
Catatan D.4	Beban Jasa	32
Catatan D.5	Beban Pemeliharaan	32
Catatan D.6	Beban Perjalanan Dinas	33
Catatan D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	33
Catatan D.8	Beban Bantuan Sosial	34
Catatan D.9	Kegiatan Non Operasional	34
Catatan D.10	Pos Luar Biasa	34
Catatan E.	Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	35
Catatan E.1	Aset Tak Berwujud	35
Catatan E.2	Surplus (Defisit) LO	35
Catatan E.3	Koreksi Nilai Persediaan	35
Catatan E.4	Koreksi Aset Tetap	35
Catatan E.5	Koreksi Atas Beban	35
Catatan E.6	Koreksi Atas Pendapatan	36
Catatan E.7	Ekuitas Akhir	36
Catatan F.	Pengungkapan Penting Lainnya	36
Catatan F.1	Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	36
Catatan F.2	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	36
Catatan F.3	Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	36
Catatan F.4	Rekening Pemerintah	37
Catatan F.5	Penyusutan Aset	37
Catatan F.6	Pengungkapan Lain-lain	37

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	:	Badan Layanan Umum
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	:	Bendahara Umum Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
MA	:	Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA	:	Tahun Anggaran
TAB	:	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
UP	:	Uang Persediaan



Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

Jln. Khatib Sulaiman No. 54 Sawahlunto

Telp (0754) 61083 Fax. (0754) 61367

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sawahlunto, 31 Desember 2017

Sekretaris
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Bet Mukhardi, S.Sos
NIP 19721130 199701 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan KPU Kota Sawahlunto Semester II Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kemnetrian Negara/Lembaga serta berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar **Rp6.652.852** yang diperoleh dari penjualan BMN yang sudah rusak dan Jasa Giro Rekening Hibah bulan Agustus dan September 2017.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember Tahun 2017 adalah sebesar **Rp4.917.780.230** atau mencapai **95.92** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp5.126.863.000**

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar **Rp829.997.014** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp229.555.552**; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar **Rp600.441.462**; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar **Rp0**. dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar **Rp0**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp829.997.014**

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan dari kegiatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp4.936.452**, sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp4.714.747.683** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp (4.709.811.231)**. Kegiatan Non Operasional surplus sebesar **Rp 1.716.400** dari Pelepasan Aset Non Lancar, sedangkan Jumlah beban dari kegiatan Pelepasan Aset Non Lancar **Rp. 0** dan

Rp. 1.891.350 dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, sedangkan jumlah beban dari kegiatan non operasional lainnya **Rp. 6.178.470** sehingga jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional **Rp. (2.570.720)**, Pos Luar Biasa **Rp.0** ,sehingga terdapat surplus (defisit) LO sebesar **Rp(4.712.381.951)**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp385.838.013** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp (4.712.381.951)** kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Aset Tahun Berjalan **Rp0** dan Koreksi Nilai Persediaan sebesar **Rp172.208.950** sehingga transaksi antar entitas menjadi sebesar **Rp.4.984.332.002** , kenaikan/penurunan ekuitas **Rp444.159.001** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai **Rp829.997.014**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Operasional, dan laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2017	2016
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	73.204.624	
Persediaan	C.1.3	156.350.928	156.350.928
Persediaan yang belum diregister		0	0
Jumlah Aset Lancar		229.555.552	156.350.928
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2.2	1.280.680.356	965.455.174
Gedung dan Bangunan	C.2.3	285.688.000	151.305.400
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(965.926.894)	(887.273.489)
Jumlah Aset Tetap		600.441.462	229.487.085
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.2.8	54.358.700	54.358.700
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	C.2.9	(54.358.700)	(54.358.700)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		829.997.014	385.838.013
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.3.1	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.3.2	0	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Jumlah Ekuitas	C.4.1	829.997.014	385.838.013

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2017	2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4.936.452	0
JUMLAH PENDAPATAN		4.936.452	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.661.216.763	1.698.707.395
Beban Persediaan	D.3	56.174.380	18.599.072
Beban Barang/Jasa	D.4	2.458.282.629	335.414.545
Beban Pemeliharaan	D.5	104.446.201	97.891.644
Beban Perjalanan Dinas	D.6	318.147.955	58.848.700
Beban Bantuan Sosial	D.6	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	116.479.755	83.484.892
Beban Perjalanan Dinas	D.6	0	0
Jumlah Beban Operasional		4.714.747.683	2.292.946.248
JUMLAH BEBAN		4.719.684.135	2.292.946.248
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.709.811.231)	(2.292.946.248)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
		D.12	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		1.716.400	4.027.000
Beban Pelepasan Aset Non lancar		0	15.866.458
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Pa		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainn		1.891.350	6.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6.178.470	16.550
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(2.570.720)	(11.850.008)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.570.720)	(11.850.008)
POS LUAR BIASA			
		D.13	
Pendapatan PNB		0	0
Bebas Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(4.712.381.951)	(2.304.796.256)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2017	2016
EKUITAS AWAL	E.1	Rp 385.838.013	Rp 467.127.087
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	Rp (4.712.381.951)	Rp (2.304.796.256)
PENYESUAIAN NILAI ASET/KEWAJIBAN		Rp 172.208.950	Rp 283.827
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	Rp -	Rp -
KOREKSI ASET TETAP	E.4	Rp -	Rp -
KOREKSI ATAS BEBAN	E.5	Rp -	Rp -
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	Rp -	Rp -
KOREKSI LAIN-LAIN		Rp -	Rp -
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	4.984.332.002	2.223.223.355
EKUITAS AKHIR		829.997.014	385.838.013

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Santur, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto diharapkan kualitas laporan K/L dapat

ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto berkomitmen dengan visi “ *Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia* “.

Untuk mewujudkan visi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Membangun lembaga penyelenggara pemilihan Umum yang memiliki Kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Basis

Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

Kebijakan

Akuntansi

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Pendapatan-

LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan *atau* Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:
- Pendapatan Non Kegiatan Operasional Lainnya
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban ; terjadinya konsumsi aset ; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya

klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksan Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyisihan

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Piutang Tak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk

sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan MasaManfaatAsetTetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1 Pendapatan**

Realisasi

Pendapatan

Negara dan

Hibah

Rp6.652.852,-

Realisasi Pendapatan yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp6.652.852** atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp0**.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	6.652.852	0,00
2. Pendapatan Jasa	0	0	0,00
3. Pendapatan Iuran dan Denda	0	0	0,00
3. Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00
Jumlah	0	6.652.852	0,00

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2017	REALISASI 2016	NAIK (TURUN) %
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.652.852	4.027.000	-
2. Pendapatan Jasa	-	-	-
3. Pendapatan Iuran dan Denda	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah Pendapatan	6.652.852	4.027.000	-

B.2. Belanja

Realisasi Belanja

Negara

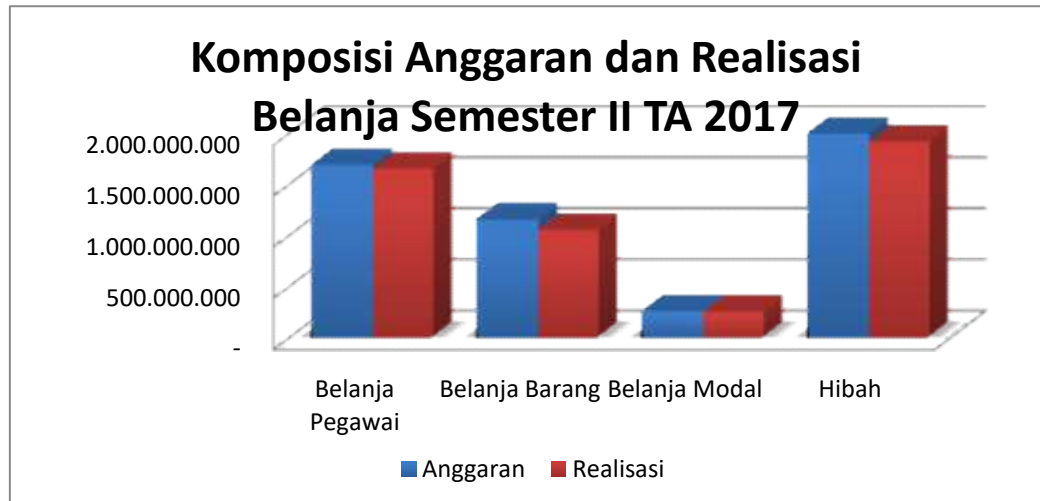
Rp4.917.780.230

Realisasi belanja instansi pada Per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp4.917.780.230** atau 95,92 persen dari anggaran belanja sebesar **Rp5.126.863.000**. Rincian Anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2017

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	1.696.121.000	1.661.216.763	97,94
Belanja Barang	1.164.030.000	1.063.737.909	91,38
Belanja Modal	266.712.000	266.030.182	99,74
Hibah	2.000.000.000	1.926.795.376	96,34
Total Belanja Kotor	5.126.863.000	4.917.780.230	95,92
Pengembalian Belanja		-	0
Belanja Netto	5.126.863.000	4.917.780.230	95,92

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Per 31 Desember 2017 Realisasi Belanja Per 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 8 %.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2017	REALISASI 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.661.216.763	1.698.707.395	(2,21)
Belanja Barang	1.063.737.909	511.597.636	107,92
Belanja Modal	266.030.182	169.453.240	100,00
Hibah	1.926.795.376	0	-
Jumlah Belanja	4.917.780.230	2.227.250.355	120,80

Belanja Pegawai
Rp1.661.216.763

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp1.661.216.763** dan **Rp1.698.707.395**.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2017	REALISASI 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.661.216.763	1.698.707.395	(2,21)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.661.216.763	1.698.707.395	(2,21)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	1.661.216.763	1.698.707.395	(2,21)

Belanja Barang
Rp2.941.338.285
5

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp2.941.338.285** dan **Rp511.597.636**

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar **71** persen dari Realisasi Belanja Barang 2016

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2017	REALISASI T.A 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	199.062.305	221.022.652	(9,94)
Belanja Barang Non Operasional	2.174.401.336	75.511.483	2.780
Belanja Jasa	84.818.988	38.880.410	118,15
Belanja Pemeliharaan	101.050.201	97.270.644	3,89
Belanja Barang Persediaan	63.857.500	20.063.747	100,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	318.147.955	58.848.700	-
Jumlah Belanja Kotor	2.941.338.285	511.597.636	474,93
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	2.941.338.285	511.597.636	474,93

Belanja Modal
Tanah Rp0

B.5 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II 31 Desember TA 2017 sama nol persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain: Tidak Pagu Anggaran Belanja Modal Tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI SEM 2 T.A. 2017	REALISASI SEM 2 T.A. 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belana Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp315.225.182

B.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing - masing sebesar **Rp315.225.182** dan **Rp16.945.324**

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2017	REALISASI 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	315.225.182	16.945.324	100,00
Jumlah Belanja Kotor	315.225.182	16.945.324	100,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	315.225.182	16.945.324	0,00

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0

B.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2017	REALISASI 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00

Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp0

B.8 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2017 sama sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Tidak Terdapatnya anggaran belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2017

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 JUNI 2017	REALISASI 30 JUNI 2016	Naik (Turun) %
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00

Belanja Sosial
Rp0

B.9 Belanja bantuan sosial

Jumlah realisasi belanja sosial 31 desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluara
n Rp0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** yang merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
BRI Unit Sawahlunto	-	-
Uang Tunai	-	-
	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak .

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
BRI Unit Sawahlunto	-	-
Uang Tunai	-	-
	-	-

C.3 Persediaan

Persediaan
Rp156.350.
928

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar **Rp156.350.928** dan **Rp156.350.928**.

Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan

No	Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Kotak Suara 2004	73.362.300	73.362.300
2	Bilik Suara 2004	23.617.228	23.617.228
3	Kotak Suara 2009	37.679.400	37.679.400
5	Bilik Suara 2009	21.692.000	21.692.000
Jumlah		156.350.928	156.350.928

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik

Tanah
Rp0

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPU Kota Sawahlunto per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp0**. atau tidak ada aset KPU Kota Sawahlunto berupa Tanah karena baik tanah maupun gedung bangunan Kantor KPU masih merupakan milik/aset Pemerintah Kota Sawahlunto yang dipinjam pakai kepada KPU Kota Sawahlunto.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 01 Januari 2016	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Mutasi kurang:		
Transfer keluar	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2016	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2016	Rp	-

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Tanah

No.	Luas (m2)	Lokasi	Nilai	% Naik / (Turun)
1	-	-	0	
2	-	-	0	
Jumlah			0	-

Peralatan
dan Mesin
Rp1.280.680.356

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah **Rp1.280.680.356** dan **Rp965.455.174**

Mutasi Nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 01 Januari 2017	Rp 965.455.174
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp 315.225.182
Mutasi kurang:	
Transfer keluar	Rp -
Saldo per 31 Desember 2017	Rp 1.280.680.356
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp 962.117.721
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp 318.562.635

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin sebagai berikut :

a. Transaksi Penambahan dari pembelian :

NO.	URAIAN	JUMLAH	NILAI
1	Kotak Saran PPID	1	750.000
2	CPU	2	24.064.482
3	Laptop	1	7.175.127
4	Printer	1	2.322.842
5	Hard Disk	2	1.686.294
6	Lemari Kayu	3	4.515.750
7	Meja Resepsionis	1	9.248.925
8	Braket Standing	1	300.000
9	Miniatur TPS	1	9.126.275
10	Printer Dot Matrik	1	2.330.000
11	LCD Projector	1	10.130.000
12	Note book	1	15.260.000
13	Printer Laserjet	1	9.450.000
14	Scanner	1	19.490.000
15	PC	1	9.962.000
16	Hard Disk Eksternal	1	1.050.000
17	PC All In One	1	13.830.000
18	Layar Infocus Motorized	1	5.610.000
19	Kamera Digital	2	20.160.000
20	Handycam	1	4.620.000
21	Notebook	2	10.940.000
22	Voice Recorder	1	1.280.000
23	Notebook	3	45.780.000
24	Printer	2	6.640.000
25	Printer Scanner	1	10.460.000
26	Hard Disk 1 TB	1	1.060.000
27	Hard Disk 2 TB	1	1.490.000
28	Printer kertas A3	1	7.875.000
29	Notebook	1	9.688.000
30	PC	1	11.085.000
31	Kursi Besi/kursi tunggu	1	1.430.000
32	Kipas Gantung	3	1.435.500
33	Tangga Lipat	1	1.485.000
34	Notebook	2	16.752.000
35	PC	3	24.960.000
36	Printer Laserjet	4	5.808.000
37	Printer Epson	1	1.675.000

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung
dan
Bangunan
Rp285.688.000*

C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah **Rp285.688.000** dan **Rp151.305.400**.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2017	151.305.400
Mutasi tambah:	
Penilaian kembali nilai aset	134.382.600
Pengembangan melalui KDP	-
Mutasi kurang:	
-	
Saldo per 31 Desember 2017	285.688.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2017	3.809.173
Nilai Buku per 30 Juni 2017	281.878.827

Transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Transaksi Penambahan dari Pengembangan Saldo aset

1		-
2		-
	Jumlah	-

b. Transaksi Penambahan dari Pengembangan Melalui KDP

1		
2		
	Jumlah	-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan,
Irigasi dan
Jaringan
Rp0*

C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Tidak ada mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan.

Aset Tetap
Lainnya
Rp0

C.8 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah **Rp0** dan **Rp0** merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar **Rp0**, sedangkan nilai akumulasi penyusutannya adalah sebesar **Rp0**.

Mutasi Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2017	Rp0,00
Mutasi tambah:	
- pembelian	Rp0,00
- penyelesaian pembangunan	Rp0,00
- koreksi pencatatan nilai	
Mutasi kurang:	Rp0,00
- koreksi pencatatan nilai	Rp0,00
Saldo per 31 Desember 2017	Rp0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp0,00

Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan dalam Lampiran A1.

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0

C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Konstruksi dalam pengerjaan mencakup Saldo asset tetap yang masih dalam proses pembangunan, yang sampai dengan tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Mutasi transaksi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2017	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
Pengembangan KDP	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	-
Saldo per 31 Desember 2017	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	
Nilai Buku per 31 Desember 2017	-

Transaksi penambahan dan pengurangan konstruksi dalam pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut: Rincian aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(965.926.
894)

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing **Rp (965.926.894)** dan **Rp(887.273.489)**.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian Saldo sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp -	Rp -	Rp -
2	Peralatan dan Mesin	Rp 1.280.680.356	Rp 962.117.721	Rp 318.562.635
3	Gedung dan Bangunan	Rp 285.688.000	Rp 3.809.173	Rp 281.878.827
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -		Rp -
6	Aset Lain - lain	Rp 54.358.700	Rp 54.358.700	Rp -
	Akumulasi Penyusutan	Rp 1.620.727.056	Rp 1.020.285.594	Rp 600.441.462

Aset Tak
Berwujud
Rp0

C.11 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-
Lain Rp
0

C.12 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing **Rp0** dan **Rp54.358.700**

Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut

Saldo per 01 Januari 2017	Rp	54.358.700
Mutasi tambah:	Rp	-
Pembelian	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Transfer keluar	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	54.358.700
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp	(54.358.700)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp	-

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

rincian aset lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini

Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset
Lainnya
Rp(54.358.
700)

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing **Rp (54.358.700)** dan **Rp(54.358.700)**. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -
2	Aset Lain-lain	Rp 54.358.700	Rp (54.358.700)	Rp -
	Akumulasi Penyusutan	Rp 54.358.700	Rp (54.358.700)	Rp -

C.14 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Muka (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang muka dari KPPN

Uang muka
dari KPPN
Rp
0

adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok Aset Lancar

*Pendapatan
Yang
Ditangguhkan
Rp0*

C.15 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2017.

*Pendapatan
Diterima
Dimuka Rp0*

C.16 Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar **Rp0** dan **Rp0** merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

*Utang
kepada
Pihak
Ketiga Rp0*

C.17 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada KPU Kota Sawahlunto per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp -	-
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	-
3	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp -	-
Total		-	-

*Kewajiban
Jangka
PendekRp0*

C.18 Dana yang harus disediakan untuk Kewajiban jangka pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek yaitu utang kepada pihak ketiga **Rp0** dan Uang Muka dari KPPN **Rp0**

*Barang/jasa
yang masih
harus
diserahkan
Rp0*

C.19 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

*Barang/jasa
yang masih
harus
diterima
Rp0*

C.20 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** Perkiraan tersebut merupakan ekuitas berupa barang/jasa yang akan dari kepada pihak lain.

*Ekuitas Rp
829.997.014*

C.21 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp.829.997.014** dan **Rp385.838.013** Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp4.936.452

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar **Rp4.936.452** dan **Rp0**. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER TA. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	0,00
2. Pendapatan Jasa	-	-	0,00
3. Pendapatan Iuran dan Denda	-	-	0,00
3. Pendapatan Lain-lain	4.936.452	-	0,00
Jumlah Pendapatan	4.936.452	-	0,00

Beban Pegawai
Rp1.661.216.763

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp1.661.216.763** dan **Rp1.698.707.395**. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2017	2016	Naik (Turun) %
Beban Gaji/Tunjangan	1.661.216.763	1.698.707.395	(2,20)
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	0	-
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	1.661.216.763	1.698.707.395	(2)

Beban
Persediaan
Rp56.174.380

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp56.174.380** dan **Rp18.599.072**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2017	Per 2016	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	-
Pita Cukai, Materai dan Legis	0	0	-
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	-
Beban Persediaan Lainnya	56.174.380	18.599.072	202
Jumlah	56.174.380	18.599.072	202

Beban Barang
dan Jasa
Rp2.458.282.629
9

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp2.458.282.629** dan **Rp335.414.545**. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Jasa 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2017	2016	Naik (Turun) %
Beban Barang dan Jasa	2.458.282.629	335.414.545	632,90
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	-
Beban Jasa Konsultan	0	0	-
Beban Jasa Profesi	-	-	-
Jumlah	2.458.282.629	335.414.545	632,90

Beban
Pemeliharaan
Rp104.446.201

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp104.446.201** dan **Rp97.891.644**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2017	2016	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.994.710	20.570.460	82,51
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78.055.491	76.700.184	(15,66)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	3.396.000	621.000	67,30
Jumlah	104.446.201	97.891.644	134

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas Rp318.147.955

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp318.147.955** dan **Rp58.848.700**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2017	2016	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	97.363.092	56.748.700	5,91
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.380.000	2.100.000	-
Beban Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	140.550.000	0	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	55.854.863	-	-
Jumlah	318.147.955	58.848.700	5,91

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp116.479.755

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp116.479.755** dan **Rp83.484.892**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2017	2016	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	111.157.528	80.458.776	11,46
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.322.227	3.026.108	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	116.479.755	83.484.884	11,46
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	116.479.755	83.484.884	11,46

Beban Lain-Lain
Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban Bantuan Sosial merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja Bantuan Sosial. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Lain-lain 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2017	2016	Naik (Turun) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan sosial dalam bentuk Uang	0	0	-
	0	0	-
	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Non
Operasional
Rp 1.716.400

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2017	2016	Naik (Turun) %
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	1.716.400	(11.839.458)	(114,49
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	1.891.350	6.000	(31.422,50
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	-
Beban Kegiatan Non Operasional	6.178.470	16.550	37,232,14
Jumlah Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	(4.287.120)	(10.550)	40,536,20
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(2.570.720)	(11.850.008)	(68,50

Pos Luar Biasa
Rp0

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN	31 Desember 2017	2016	Naik (Turun) %
Pendapatan PNPB	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	0	0	-
Beban Persediaan	0	0	
Jumlah	0	0	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Ekuitas Awal
Rp385.838.013

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp385.838.013** dan **Rp467.127.087**.

Defisit LO
Rp(4.712.381.951)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar **Rp(4.712.381.951)** dan **Rp(2.304.796.256)**. Defisit LO merupakan selisih kurang antar surplus/defisit kegiatan operaisonal, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp283.800**. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2017 dan 2016

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Jumlah	0

Koreksi Aset Tetap
Rp0

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp27**.

Koreksi Atas Beban
Rp0

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian untuk 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	0
Beban Jasa	0
	0
Jumlah	0

Koreksi Atas
Pendapatan Rp0

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian untuk 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
0	0
Jumlah	0

Ekuitas Akhir
Rp829.997.014

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp. 829.997.014** dan **Rp385.838.013**

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

-

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak ada Daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

F.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Informasi belanja secara akrual untuk KPU Kota Sawahlunto 31 Desember 2017 adalah untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga sebesar **Rp. 183.900**, merupakan belanja langganan daya dan jasa yaitu langganan Air PDAM bulan Desember 2017.

F.4 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional KPU Kota Sawahlunto adalah

No	Nama Satker	Nomor Rekening	Nama Bank	Nama Rekening	NPWP
1.	KPU Kota Sawahlunto	5534-010000-97-304	BRI Cabang Sijunjung Unit Sawahlunto	BPG 077 KPU Kota Sawahlunto	00.431.708.7.203.000
No	Nama Satker	Nomor Rekening	Nama Bank	Nama Rekening	NPWP
1.	KPU Kota Sawahlunto	111-00-1041922-0	Bank Mandiri KCP Sawahlunto	RPL 077 KPU SWL UTK HIBAH PILKADA 2018	00.431.708.7.203.000

F.5 PENYUSUTAN NILAI ASET

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Semester I Tahun Anggaran 2017 tanggal 06 Juli 2017 Nomor : BAR-96/WKN.3/KNL.01/I/2017 pada KPU Kota Sawahlunto terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp. 887.273.489, Aset Lainnya Rp. 54.358.700 dan Penyusutan Ekstrakomtabel sebesar Rp. 2.425.000. Berita Acara Terlampir.

F.6 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Pada tanggal 15 September 2017 terjadi penggantian Bendahara Pengeluaran KPU Kota Sawahlunto dikarenakan Sumarni, S.Sos cuti melahirkan dan digantikan oleh Wiska Novita sesuai Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 64/HK.03.2-Kpt/Sek-Kot/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Nomor 08/Kpts/KPU-Sesko-003.435115/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2017 dengan lampiran sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Bet Mukhardi, S.Sos
 Pejabat Pembuat Komitmen : Juni Lesmita Devi, SE
 Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Gustamar, S.Sos
 Bendahara : Wiska Novita
 Staf : Puti Astri P, SE
 Staf : Nila Irawati Putri

2. DIPA Tahun Anggaran 2017 Pada KPU Kota Sawahlunto untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 ada revisi POK dan Revisi DIPA yaitu ;

- Revisi POK

Bulan Januari 2017 dilakukan Revisi POK, yaitu :

Kegiatan 3355.003

Akun	Semula	Menjadi
521811	4.672.000	2.672.000
521211	0	2.000.000

Kegiatan 3360.013

Akun	Semula	Menjadi
521811	4.109.000	2.109.000
521211	0	2.000.000

Kegiatan 3360.994

Akun	Semula	Menjadi
521111	123.600.000	117.400.000
521811	0	6.200.000
521114	3.000.000	2.000.000
522111	44.035.000	20.304.000
522112	0	18.000.000
522113	0	3.131.000
522119	0	3.600.000

Kegiatan 3363.010

Akun	Semula	Menjadi
521811	5.000.000	3.000.000
521211	0	2.000.000

Pada Tanggal 31 Maret revisi POK, yaitu :

Kegiatan 3364.032

Akun	Semula	Menjadi
522191	15.000.000	10.788.000
521211	0	4.212.000

Pada tanggal 2 Juni 2017 KPU RI melakukan Revisi I DIPA yaitu pengurangan pagu belanja pegawai pada kegiatan 3355.994 sebesar Rp. 398.666.000,- sehingga pagu awal DIPA semula Rp. 2.363.742.000,- berkurang menjadi Rp. 1.965.076.000,-

Kegiatan 3355.994

Akun	Semula	Menjadi
512411	1.280.590.000	999.010.000

Pada Tanggal 18 Agustus 2017 KPU RI melakukan Revisi 2 DIPA yaitu penambahan pagu kegiatan yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu 2019 sebesar Rp. 921.787.000,- sehingga pagu awal DIPA semula Rp. 1.965.076.000,- menjadi Rp. 2.886.863.000,-

Pada Tanggal 16 November 2017 KPU Provinsi melakukan Revisi 3 DIPA yang merupakan revisi antar satker dalam 1 wilayah yaitu penambahan pagu Belanja Pegawai berkaitan dengan kekurangan tunjangan kinerja PNS dan rapel tukin PNS sebesar Rp. 240.000.000,- sehingga pagu awal DIPA semula Rp. 2.886.863.000,- menjadi Rp. 3.126.863.000,-

Pada Tanggal 30 November 2017 KPU Kota Sawahlunto melakukan Revisi 4 DIPA yang merupakan revisi Hibah Pilwako ke DIPA yaitu penambahan pagu sebesar Rp. 2.000.000.000,- sehingga pagu awal DIPA semula Rp. 3.126.863.000,- menjadi Rp. 5.126.863.000,-

1. Pada tahun 2017 KPU Kota Sawahlunto menerima hibah langsung dalam bentuk uang dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 sebesar Rp. 10.701.053.526,- (sepuluh milyar tujuh ratus satu juta lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 134.4/4/HUK-HAM/2017 dan Nomor 130/PR.07-NK/1373.KPU-Kota/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017. (*NPHD terlampir*)
2. Hibah sebagaimana dimaksud angka 1 diatas merupakan Hibah yang bersifat tahun jamak (multi years) yang jadwal pelaksanaannya pada tahun 2017 dan 2018
3. Pada tahun 2017 KPU Kota Sawahlunto menerima dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.701.053.526,- (delapan milyar tujuh ratus satu juta lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) pada tahun 2018.
4. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah sebagaimana telah dirubah dengan PMK 99/PMK.05/2017, ada tahapan pengesahan yang harus dilaksanakan setelah NPHD ditandatangani, yaitu :
 - a. Penerbitan Nomor Register
KPU Kota Sawahlunto telah mengajukan surat permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah dengan Nomor 088/PP.01.3-SD/1373/Sek-Kot/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 dan telah ditetapkan Nomor Register Hibah Langsung Dalam Negeri dengan Nomor Register Hibah 2QDD1F9A sesuai surat Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat Nomor S-1313/WPB.03/2017 tanggal 4 September 2017.
 - b. Pembukaan Rekening Hibah
Merujuk pada PMK 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/satuan Kerja KPU Kota Sawahlunto mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Nomor 075/KU.03.2/Sek-Kot/VII/2017

- tanggal 14 Juli 2017 dan Surat KPPN Sijunjung Nomor S-356/WPB.03/KP.0530/2017 tanggal 17 Juli 2017 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening atas nama KPU Kota Sawahlunto yang diberi nama "RPL 077 KPU SWL UTK HIBAH PILKADA" (surat permohonan dan persetujuan serta rekening terlampir)
- c. Penyesuaian Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja yang bersumber dari Hibah dalam DIPA
- Berdasarkan PMK Nomor 99/PMK.05/2017 pasal 26 dan Pasal 27, KPU Kota Sawahlunto melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang kedalam DIPA, penyesuaian pagu belanja dilakukan melalui revisi DIPA pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan menyebabkan pagu DIPA KPU Kota Sawahlunto yang semula berjumlah Rp. 3.126.863.000,- (tiga milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) bertambah menjadi Rp. 5.126.863.000,- (lima milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). (*Petikan DIPA terlampir*)
- d. Pengesahan Pendapatan Hibah dan Belanja Dalam Bentuk Uang
- Dari jumlah dana Hibah yang diterima pada Tahun 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk pelaksanaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto di Tahun 2017 sebesar Rp. 1.926.795.376,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan telah diajukan SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah langsung) ke KPPN Sijunjung pada tanggal 31 Desember 2017 dan telah terbit SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung) Nomor 00274T/656223/2017 tanggal 31 Desember 2017. (*SP2HL dan SPHL terlampir*)
- Sisa yang belum dilakukan pengesahan sebesar Rp. 73.204.624,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus empat ribu enam

ratus dua puluh empat rupiah) menjadi saldo akhir pada Tahun 2017 dan akan menjadi Saldo Awal di Tahun 2018 sesuai dengan PMK 99/PMK.05/2017 Pasal 28 (1) *Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu belanja dimaksud dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya.*